

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dari kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan produksi, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien, sehingga perlu adanya pengembangan pengembangan dibidang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat mencegah dan mengendalikan tingkat inflasi dan stabilnya kurs mata uang asing. Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa, maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. "Kehidupan yang serba lebih baik" tersebut bertolak dari tiga nilai pokok, yaitu: Pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari

belitkan sikap menghamba dan ketergantungan kepada negara-bangsa lain.(Todaro, 2003).

Maluku Utara merupakan provinsi bagian timur Negara Republik Indonesia yang sangat berperan untuk perekonomian nasional dari kekayaan alam seperti rempah-rempah, pariwisata, emas, nikel dan lain-lain yang dimiliki. Semua provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara harus mampu berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya dalam menghadapi tantangan perekonomian global, serta mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam pembangunan terutama pada saat era reformasi, dimana setiap daerah diberi kebebasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang ada dan mengolahnya secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang ada pada lingkup daerahnya. Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

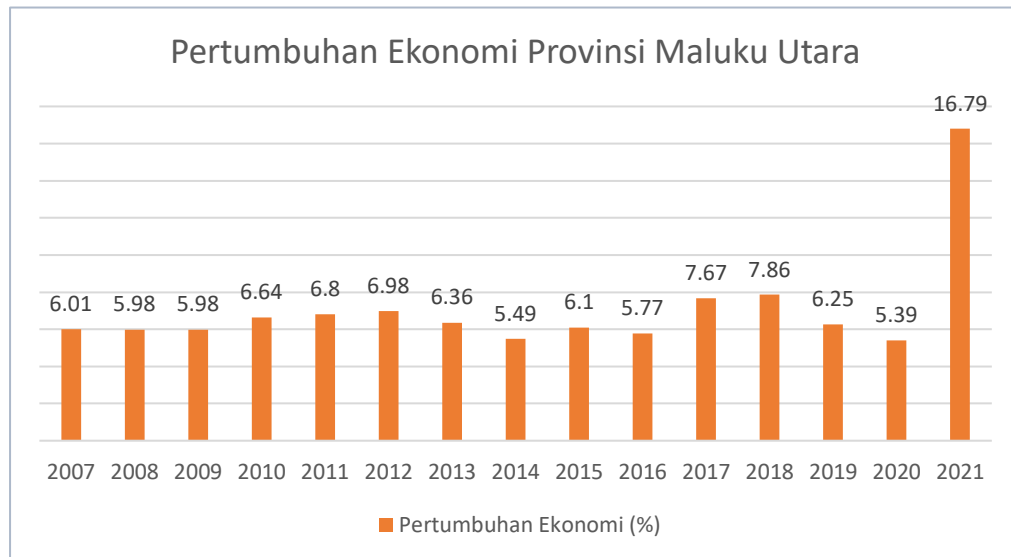
Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Provinsi Maluku Utara juga dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang kaya karena lokasinya yang berada di empat pulau bergunung yang pastinya menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Belum lagi posisinya yang terletak di bibir Samudra Pasifik yang mana jika dikembangkan dengan baik hal ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan ekonomi Maluku Utara.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan daerah. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan-kegiatan produktif untuk pelaku ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang di ukur dengan pertumbuhan PDRB dan persentase pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2021:

Gambar Grafik 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Periode 2010-2021



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2023

Dari grafik 1.1. Terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 sebesar 6,01 persen kemudian pada tahun 2008 5,98 perse, pada tahun 2009 sebesar 5,98 perse. Selanjutnya pada tahun 2010 sebesar 6,64 persen kemudian pada tahun 2011 sebesar 6,8 persen dan mengalami kenaikan 6,98 persen di tahun 2012. Kemudian mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 6,36 persen menjadi 5,49 persen pada tahun 2014. Kemudian meningkat kembali mencapai 6,1 persen pada tahun 2015 namun kembali mengalami perlambatan, yaitu hanya mampu tumbuh 5,77 persen di tahun 2016. Di tahun 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan mencapai 7,67 persen dan peningkatan pertumbuhan masih berlangsung pada tahun 2018 mencapai 7,86 persen. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan dengan nilai 6,25 persen pada tahun 2019 dan masih mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 5,39 persen dan ini adalah angka yg

tersendah selama periode 2007-2021. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara Mengalami peningkatan drastis mencapai angka 16,79 persen pada tahun 2021.

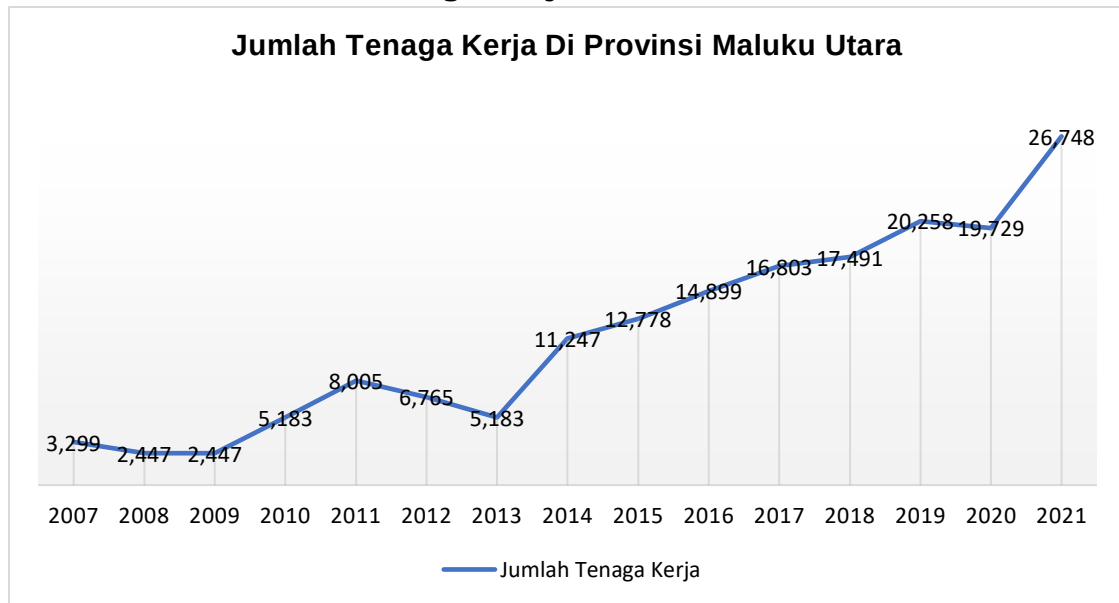
Boediono (2007) Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang lagi menjalankan pembangunan ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah menjadi potensi dan upaya Indonesia menjadi Negara maju. Akan tetapi penanganan yang tidak maksimum mengakibatkan rendahnya kemampuan tenaga kerja yang bermutu, sehingga Indonesia masih menjadi kapasitas sebagai Negara berkembang.

Penerapan pembangunan tidak terkecualikan dari karakter penduduk. Agar target pembangunan bisa berhasil, maka penerapan pembangunan yang tertera memerlukan masyarakat yang bermutu, sebab kualitas masyarakat kerap dijadikan kepedulian pemerintah. Masyarakat yang selalu meningkat akan memperbanyak jumlah pekerja. Adanya perkembangan tersebut membuat wilayah itu dapat memperbanyak produksi.

Tenaga kerja bisa dikatakan salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja bisa juga merupakan salah satu input dalam mendorong produktivitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk melihat pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 1.2 .
Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2023

Dari garfik 1.2 terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 tenaga kerja sebanyak 3,299 ribu jiwa, pada tahun 2008-2009 sebanyak 2,447 ribu jiwa dan merupakan angka yg paling rendah. 2010 jumlah tenaga kerja sebanyak 5,183 jiwa kemudian pada tahun 2011 sebanyak 8,005 jiwa, kemudian pada tahun 2012 sebanyak 6,765 jiwa, 2013 jumlah tenaga kerja sebanyak 5,183 jiwa, pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja sebanyak 11,247 jiwa. Di tahun 2015 jumlah tenaga kerja bertambah sebanyak 12,778 jiwa, jumlah tenaga kerja pada tahun 2016 naik sebanyak 14,899 jiwa , tahun 2017 jumlah tenaga kerja sebanyak 16,803 jiwa dan di tahun 2018 jumlah tenaga kerja sebanyak 17,491. Selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 20,258 jiwa, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 19,729 jiwa, kemudian di tahun 2021 sebanyak 26,748 jiwa.

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah yang menyebabkan tidak proporsionalnya

penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral akan menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian nasional (Kusumosuwidho, 1981).

Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi akan mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang terpengaruhi dari tenaga kerja bukanlah dari segi kuantitas melainkan kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik maka akan terjadi peningkatan produksi. Tenaga kerja itu sifatnya heterogen baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, kemampuan kerja, kesehatan, pendidikan, keahlian dan lain sebagainya, oleh karena itu diperlukan perencanaan tenaga kerja guna mendukung pembangunan nasional Indonesia.

Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, semakin banyak output (PDRB) yang dihasilkan (Alhiriani, 2013).

Manusia menjadi alasan penting pada pertumbuhan ekonomi. Pembentukan aspek manusia saling berhubungan dengan adanya kenaikan GDP per kapita bisa dibuktikan dari kemampuan serta kreativitas yang meningkat di lingkungan tenaga kerja (Jhingan, 2007).

Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi salah satunya diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula keterlibatan penduduk dalam geliat perekonomian.

Salah satu tujuan penting dalam pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi yaitu penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja terlebih untuk Negara yang sedang berkembang terutama Negara Indonesia dimana pertumbuhan angkatan kerjanya lebih cepat berkembang. Pembangunan ekonomi juga memiliki tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara langsung dapat menaikkan kesejahteraan rakyat, penduduk dalam pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu masalah yang paling pokok.

Secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan. Penduduk dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, jumlah penduduk menentukan efisiensi perekonomian dan kualitas tenaga kerja itu sendiri, karena tenaga kerja akan menjadi sebuah kontribusi ataupun menjadi kendala dalam sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu Negara (Wara, 2016).

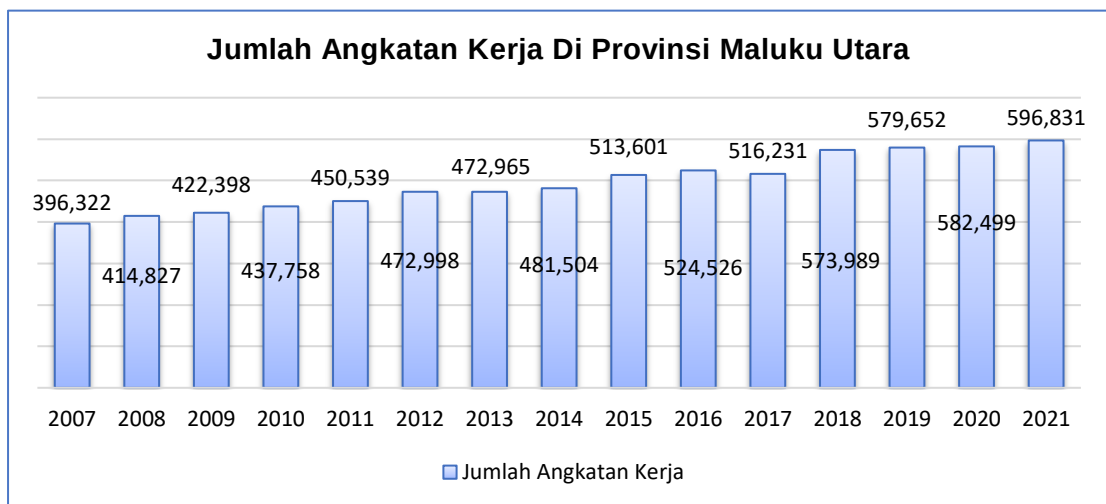
Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pertambahan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dari pada kesempatan kerja akan memperbesar jumlah pengangguran yang kemudian akan berdampak pada perekonomian nasional.

Menurut Suparmoko (1998) penyerapan tenaga kerja menjadi suatu hal yang paling penting dalam peningkatan ekonomi secara agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah produksi barang dan jasa yang meningkat pada aktifnya perdagangan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi di akibatkan adanya ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat terjadi walaupun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi karena terbatasnya

informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang di butuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Tetapi peningkatan jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan agar pengangguran tidak meningkat secara terus menerus.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara, dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Angkatan Kerja Di Provinsi Maluku Utara Periode 2010-2021



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2023

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2007-2021 mengalami naik turun atau fluktuasi. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 596,831 ribu jiwa dan jumlah angkatan kerja terendah yaitu pada tahun 2007 sebesar 396,322 ribu jiwa.

Meningkatnya jumlah penduduk yang secara terus menerus apabila tidak di ikuti dengan ekspansi lapangan pekerjaan hingga hendak memunculkan akibat yang sangat besar ialah salah satunya pengangguran. Pengangguran bisa pengaruhi pemasukan warga yang sudah dicapai, yang hendak menimbulkan rendahnya tingkatan kemakmuran warga.

Apabila lapangan pekerjaan tidak bisa menyerap seluruh angkatan kerja yang terdapat hingga hendak memunculkan masalah pengangguran. Jumlah pengangguran yang bertambah hendak memunculkan bermacam dampak pada proses pembangunan ekonomi.

Bertambahnya angkatan kerja tentu saja berpengaruh terhadap jumlah pencari kerja yang harus disertakan dalam kegiatan ekonomi (bekerja). Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi dalam percepatan pembangunan suatu wilayah. Namun demikian, jumlah yang besar juga berpotensi menjadi masalah atau beban pembangunan apabila kualitasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pertumbuhannya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Investasi juga merupakan faktor penting dalam perekonomian. Dalam pandangan teori ekonomi klasik, investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Berbeda dengan pandangan teori ekonomi klasik, menurut teori neoklasik, investasi merupakan akumulasi kapital optimal. Teori neoklasik didasarkan pada pemikiran mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh produsen atau perusahaan. Dalam upaya untuk memaksimumkan keuntungannya, perusahaan akan menggunakan suatu faktor produksi hingga mencapai tingkat dimana nilai produksi marginalnya sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut.

Menurut Harrod-Domar, bahwa investasi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula investasi suatu daerah, semakin tingginya investasi, pengangguran akan menurun, apabila tingkat pengangguran rendah maka akan berbanding lurus terhadap tingkat kemiskinan (Fosu, 2010)

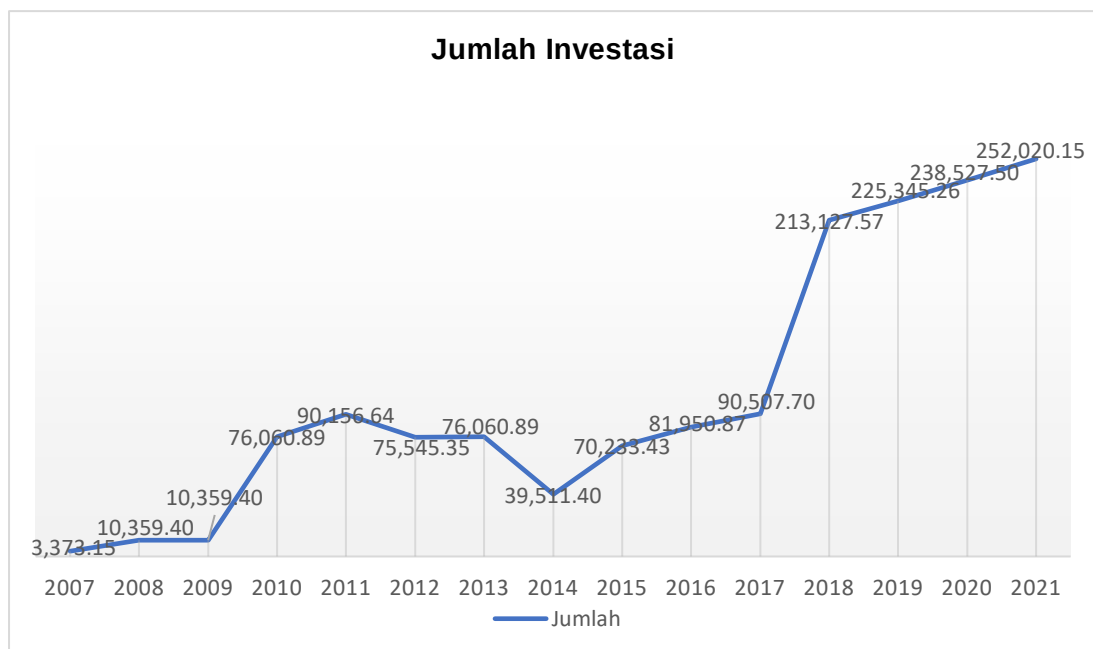
Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan dan pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi berpenduduk 1,3 juta jiwa ini, menjadi bukti bahwa saat

ini investasi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa, diantaranya di Maluku Utara.

Selain itu, juga memberi gambaran bahwa iklim investasi di Maluku Utara sangat baik, tidak saja dari segi keamanan investasi dan dukungan infrastruktur tetapi juga dari segi kemudahan investasi yang diberikan pemerintah daerah setempat. Nilai investasi terbesar di Maluku Utara adalah sektor industri pengolahan dan pertambangan, khususnya pertambangan nikel dan emas yang tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan (antaramaluku)

Untuk melihat jumlah investasi di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar Grafik 1.4.
Jumlah Investasi Di Provinsi Maluku Utara Periode 2007-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2023

Pada grafik 1.4. terlihat bahwa investasi di Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah, dan jumlah investasi terbesar di Maluku Utara adalah 252,020.15 miliar rupiah di tahun 2021 sedangkan jumlah investasi paling rendah yaitu di tahun 2007 dengan jumlah investasi sebesar 3,373.15 miliar rupiah.

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDRB, jika investasi naik, maka PDRB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDRB akan ikut turun.

Menurut Lewis dalam Todaro (2006:132), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dimulai dari investasi di sektor industri, dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan output pada sektor modern tersebut. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul sebagai berikut : “Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?
3. Apakah variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?
4. Apakah variabel tenaga kerja, angkatan kerja dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui apakah variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
3. Untuk mengetahui apakah variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
4. Untuk mengetahui apakah variabel tenaga kerja, angkatan kerja dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain :

1. Manfaat bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah khususnya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata.
3. Memberikan referensi bagi pembaca dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.